

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang diakibatkan oleh faktor alam maupun ulah manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, kerusakan alam dan dampak psikologis. Sedangkan, bencana alam merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh serangkaian peristiwa alam sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, akan tetapi dapat diprediksi untuk dapat meminimalisir kerugian dan korban.¹

Indonesia pernah mengalami bencana alam terbesar dalam sejarah tepat pada tanggal 26 Desember 2004, yaitu gempa bumi berkekuatan 9,0 magnitudo yang menyebabkan munculnya gelombang tsunami besar menghancurkan daerah Aceh yang menimbulkan banyak korban jiwa. Gempa yang kemudian menyebabkan tsunami tersebut merupakan gempa terbesar ketiga di dunia dengan kekuatan 9,0 magnitudo setelah gempa sebelumnya yang terjadi di Chile pada tahun 1960 sebesar 9,5 magnitudo dan Alaska pada tahun 1964 sebesar 9,2 magnitudo.² Gelombang raksasa muncul setelah terjadinya gempa di dasar laut sekitar 100 kilometer di sebelah barat pantai Sumatera pukul 07.59 WIB. Pusat gempa terdapat pada kedalaman sekitar 30 km dibawah laut, gempa bumi yang diakibatkan berlangsung selama 8 hingga 10 menit. Biasanya, gempa

¹ BNPB. 2020. Pengertian Bencana Alam.

² Aswab Nanda Pratama. 2018. 26 Desember 2004, Gempa dan Tsunami Aceh Menimbulkan Duka Indonesia. [online]. Diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/26/11213301/26-desember-2004-gempa-dan-tsunami-aceh-menimbulkan-duka-indonesia?page=all> (Rabu, 22 Juli 2020)

semacam ini hanya terjadi dan berlangsung hanya hitungan beberapa detik saja yang pada akhirnya menimbulkan gempa berkekuatan besar mencapai 9,1 sampai 9,3 skala Richter.³

Gempa bumi yang terjadi di perairan barat Aceh memiliki patahan yang panjang mencapai laut Andaman, patahan tersebut merupakan patahan terpanjang dalam sejarah.⁴ Penjalaran gelombang tsunami dapat terpantau di beberapa kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, dan Thailand) dan terpantau di beberapa negara Asia Selatan (Maldives, India dan Sri Lanka) serta di beberapa kawasan pantai timur Benua Afrika (Somalia).⁵

Tsunami merupakan suatu perpindahan air dalam jumlah besar yang disebabkan oleh adanya perubahan dasar laut secara vertikal. Gelombang tsunami dikategorikan dalam gelombang panjang berkisar 10 km hingga 500 km dengan panjang periodenya mencapai 5 sampai 2000 detik dan tinggi gelombang mencapai 30 km, Ketinggian gelombang tsunami akan terus bertambah semakin tinggi Ketika gelombang tersebut mendekati pantai, hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan kontur laut yang semakin dangkal.⁶

Menurut data laporan BNPB bencana tsunami Aceh merenggut korban jiwa secara keseluruhan ditaksir kurang lebih mencapai 283.100 jiwa. Sementara korban meninggal

³ Hendra Pasuhuk. 2014. Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dalam Tsunami 2004? [online]. Diakses dalam <https://www.dw.com/id/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dalam-tsunami-2004/a-18141866> (Rabu, 22 Juli 2020)

⁴ The National Science Foundation (NSF). 2005. "Analysis of the Sumatra-Andaman Earthquake Reveals Longest Fault Rupture Ever." 2005.

⁵ Njenga, F., and A. Nguithi. 2007. "Tsunami Hits East Africa." *International Medical Journal* 14 (3): 179–82.

⁶ Pietrzak, J., A. Socquet, D. Ham, W. Simons, C. Vigny, R.J. Labeur, E. Schrama, G. Stelling, and D. Vatvani. 2007. "Defining the Source Region of the Indian Ocean Tsunami from GPS, Altimeters, Tide Gauges and Tsunami Models." *Earth and Planetary Science Letters* 261 (1–2): 49–64.

di Indonesia mencapai 108.100 jiwa dan 127.700 orang dinyatakan hilang.⁷ Sedangkan menurut laporan *World Health Organization* (WHO) terdapat sekitar 500.00 orang mengalami luka ringan maupun parah.⁸ Selain menimbulkan korban jiwa, tsunami juga memberikan kerugian di beberapa sektor lain yang mengakibatkan korban yang selamat harus bertahan selama kurang lebih 7 hari di tengah tengah porak poranda pasca kejadian tsunami tersebut.

Kerusakan yang disebabkan oleh tsunami mengakibatkan lumpuhnya sektor komunikasi, sarana dan fasilitas lainnya. Jika tidak segera di dilakukan penanganan maka akan semakin bertambahnya korban jiwa. Bencana tsunami tersebut menjadikan tampanan bagi Indonesia untuk mengerti bagaimana bahaya bencana alam dalam segala aspek. Setelah terjadinya bencana alam tersebut, dunia internasional bergerak untuk merespon bencana yang terjadi di Indonesia, salah satunya *United State Agency for International Develpoment* (USAID) yaitu organisasi pemerintah Amerika Serikat yang bersifat independen bertujuan mengelola bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara negara asing.⁹ Lembaga ini memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam dan bantuan berupa program pemeliharaan kesehatan seperti vaksin, imunisasi, gizi dan program keluarga berencana.¹⁰

⁷ Hirokazu Iemura, et al., 2006, *Disaster Prevention and Management*, Vol. 15 No. 1, dalam Mohd. Robi Amri, dkk., 2015, *RBI: Risiko Bencana Indonesia*, Jakarta: BNPB Press.

⁸ WHO, *Asia Pasific Daily Report* [online] diakses dalam <https://www.who/hac/crises/idn/sitreps/APDRI122904.pdf> (Rabu, 22 Juli 2020)

⁹ USAID, *WHO WE ARE* [online] Diakses dalam <https://www.usaid.gov/who-we-are> (Jumat, 16 Oktober 2020)

¹⁰ Ibid

Laporan resmi *United State Agency for International Development* (USAID) menyebutkan bahwa lebih dari 580.000 korban yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami. Sehingga *United State Agency for International Development* (USAID) bekerja untuk mengirimkan makanan darurat, perlengkapan kebersihan bantuan medis dan bantuan psiko-sosial.¹¹ USAID juga melaksanakan program cash for work bagi pekerja yang bertugas membersihkan infrastruktur akibat bencana. Bekerja sama dengan organisasi lainnya, USAID membantu para korban dampak tsunami untuk menghindari dari bencana alam lain dengan cara memastikan korban dapat menjangkau dan memiliki akses ke air bersih dan sanitasi.¹²

USAID berhasil menggalang dukungan dari elemen pemerintahan Amerika Serikat dengan memberikan bantuan darurat lebih dari 400 juta Dolar ke Indonesia.¹³ Beberapa bulan dan tahun setelah bencana, USAID bekerja dengan Pemerintah Indonesia, LSM, dan mitra pembangunan lainnya untuk membangun kembali infrastruktur, mata pencaharian, semangat, dan ketahanan provinsi.

USAID sebagai bagian program Amerika Serikat dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan internasional ke sejumlah negara yang sedang mengalami bencana. Bantuan kemanusiaan internasional memainkan peran penting dalam respon terhadap bencana alam. Namun, sebagai bagian dari kebijakan internasional AS, bantuan kemanusiaan oleh USAID disinyalir terhubung dengan motif politik yang berperan dalam alokasi bantuan.

¹¹ USAID. 2015. EMERGENCY RESPONSE AND RECONSTRUCTION IN ACEH PROVINCE (2004-2009) [online] Diakses dalam <https://www.usaid.gov/indonesia/fact-sheets/emergency-response-and-reconstruction-aceh-province-2004-2009> (Jumat, 16 Oktober 2020)

¹² Ibid

¹³ Ibid

Motivasi yang melatar belakangi penyaluran bantuan kemanusiaan seringkali dianggap memiliki faktor-faktor pendamping, selain murni tujuan kemanusiaan, seperti agenda diplomasi bilateral jangka panjang maupun kedekatan politik antar AS dengan negara penerima. Pada tingkat penilaian motivasi ini menunjukkan bahwa terdapat kebiasaan dalam bantuan kemanusiaan melalui sudut pandang motivasi.

Bantuan kemanusiaan internasional yang bertujuan untuk meringankan penderitaan manusia dan kerugian ekonomi diharapkan semakin penting, sehingga sebagai cita-cita yang luhur, motivasi sebuah bantuan secara ideal memang perlu mengacu pada prinsip kemanusiaan. Upaya memfasilitasi bantuan yang cepat dan efisien yang independen dari politik internasional dan domestik, bantuan tersebut seharusnya mengikuti prinsip ketidakberpihakan. Prinsip tersebut secara tegas ditetapkan dalam hukum internasional dan menyatakan bahwa tindakan kemanusiaan harus dilaksanakan “semata-mata atas dasar kebutuhan, tanpa diskriminasi atas dasar faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, afiliasi etnis, agama atau pandangan politik.”¹⁴

Sementara netralitas bantuan kemanusiaan perlu diutamakan, pandangan bagaimana politik AS mempengaruhi alokasi bantuan kemanusiaan melalui USAID ataupun lembaga bantuan lainnya dapat mendistorsi alokasi bantuan kemanusiaan. Sehingga, bukan tidak mungkin bantuan kemanusiaan internasional AS mengandung motif diplomasi. Macrae berpendapat bahwa perubahan geopolitik telah menyiapkan

¹⁴ Persson, G (2004). The government's humanitarian aid policy, Government Communication 2004/05: hal. 52

panggung untuk penyatuan kembali bantuan kemanusiaan dan politik.¹⁵ Berakhirnya Perang Dingin mengakibatkan pelepasan politik kekuatan-kekuatan besar dari pinggiran geopolitik, seringkali meninggalkan aktor pembangunan dan kemanusiaan sebagai satu-satunya perwakilan kekuatan Barat di negara-negara yang telah menjadi 'tidak strategis' maupun yang sedang mengalami bencana. Bantuan pembangunan dan kemanusiaan diharapkan dapat mengisi ruang dalam koridor diplomasi. Lebih jauh lagi, berakhirnya Perang Dingin berarti penurunan rasa hormat terhadap kedaulatan negara, dan pendekatan yang lebih intervensionis terhadap hubungan internasional.

Bantuan kemanusiaan selalu menjadi kegiatan yang sangat politis. Aktivitas kemanusiaan tersebut selalu mempengaruhi ekonomi politik negara penerima, dan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik pemerintah donor. Terlepas dari pernyataan dan praktik para aktor kemanusiaan yang berusaha memastikan bahwa tindakan mereka tidak memberikan keuntungan militer, dan didorong semata-mata atas dasar kebutuhan, prinsip-prinsip netralitas dan ketidakberpihakan kemanusiaan terus-menerus diserang. Perbedaan mencolok antara jumlah dan jenis bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada berbagai negara yang menghadapi krisis akut menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak pernah disalurkan hanya berdasarkan kebutuhan. Faktor-faktor diplomatik inilah yang sekiranya dapat ditelisik dalam pemberian bantuan kemanusiaan AS melalui USAID.

¹⁵ Joanna Macrae. (2002). Politics and Humanitarian Aid. *Disaster Journal*, Volume 25, Issue 4 Special Issue: Politics and humanitarian aid First published: 16 December 2002 <https://doi.org/10.1111/1467-7717.00177>Citations: 21

USAID sebagai perpanjangan tangan AS dalam aksi kemanusiaan tampaknya semakin terkait dengan tujuan politik, dan terhubung dengan respons politik terhadap keadaan darurat yang kompleks. Bantuan kemanusiaan menjadi bagian integral dari strategi komprehensif AS untuk menyiapkan panggung untuk pembangunan yang sesuai dengan kebijakan yang dianut. Sehingga, melalui situasi bahwa bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari diplomasi yang memuat agenda politis, bantuan kemanusiaan AS melalui USAID patut diteliti lebih mendalam. Penelitian ini berupaya memeriksa motivasi AS sebagai negara donor melalui USAID ke Aceh pasca tragedi Tsunami pada tahun 2004 hingga 2009.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apakah motivasi yang mendorong upaya Amerika Serikat melalui USAID dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Aceh pasca tragedi Tsunami pada tahun 2004 hingga 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dan akademisi dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang, secara khusus tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Amerika Serikat melalui USAID dalam memberikan asistensi penanggulangan dan pemulihan kondisi pasca bencana Tsunami Aceh di Indonesia pada tahun 2004–2009. Setelah menyebutkan dan menggambarkan masalah, penulis berusaha untuk menjelaskan secara deskriptif dan teoritis jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang tertulis.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 *Humanitarian Diplomacy*

Definisi dari diplomasi kemanusiaan adalah *“persuading decision makers and opini leaders to act, at all times, in the interest of vulnerable people, and with full respect for fundamental humanitarian principles,”*¹⁶ yang artinya bahwa diplomasi kemanusiaan berupaya untuk mengajak pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas terhadap pihak yang lemah demi melindungi dan menyelamatkan dari penderitaan. Pihak pihak yang lemah dalam konteks ini merupakan korban konflik atau bencana alam.¹⁷ Dalam melakukan diplomasi kemanusiaan, negara wajib berpegang teguh pada prinsip prinsip fundamental kemanusiaan yang terdiri dari empat macam prinsip yaitu *humanity, neutrality, impartiality, dan independence.*¹⁸ *Humanity* berarti menolong mereka yang

¹⁶ “Humanitarian Diplomacy Policy”, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies [online] Diakses dalam <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy/humanitarian-diplomacy-policy/> (Rabu, 25 Agustus 2021)

¹⁷ Muhadi Sugiono dan Mohamad Rosyidin, “Menegosiasikan yang Tak Bisa Dinegosiasikan: Menjembatani Kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam Konsep Diplomasi Kemanusiaan”, hlm. 14

¹⁸Ibid

membutuhkan untuk dapat mengurangi penderitaan. *Neutrality* berarti bahwa para pekerja tidak boleh memihak siapapun dalam suatu konflik serta harus lebih fokus pada para korban dibandingkan pihak yang sedang berkonflik. *Impartiality* berarti para pekerja kemanusiaan tidak boleh berat sebelah atau pilih kasih dalam memberikan pertolongan. Sedangkan *Independence* berarti para pekerja harus melepaskan diri dari beberapa kepentingan pihak tertentu khususnya pihak yang memberikan donatur.¹⁹

Diplomasi kemanusiaan dapat terwujud dalam beberapa cara misalnya melakukan advokasi kebijakan dengan pemerintah agar tidak bertindak represif kepada para migran melainkan memberikan bantuan kepada mereka dengan komunikasi sehingga masyarakat internasional tergerak untuk membantu para korban krisis kemanusiaan. Dalam suatu negara, diplomasi kemanusiaan merupakan fasilitas guna mengekspresikan rasa *emphaty* dan *solidarity* internasionalnya. Hal tersebut akan membantu suatu negara untuk dapat meningkatkan reputasinya di kawasan Internasional sehingga dapat membangun kepercayaan dan kerja sama dalam mencapai kepentingan nasional.²⁰

Tujuan utama dari diplomasi kemanusiaan adalah fokus terhadap rasa kemanusiaan dari negara pemberi (donor) terhadap negara penerima bantuan. Apabila kemanusiaan dijadikan suatu alat untuk tujuan diplomatik maka hanya kepentingan nasional yang diutamakan.²¹ Hal terpenting dari diplomasi kemanusiaan adalah

¹⁹ Muhadi Sugiono dan Mohamad Rosyidin, “Menegosiasikan yang Tak Bisa Dinegosiasikan: Menjembatani Kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam Konsep Diplomasi Kemanusiaan”, hlm. 10

²⁰ Ibid

²¹ Jacinta O'Hagan, “The Challenge of Humanitarian Diplomacy“, Australian Institute of International Affairs, Diakses dalam <http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-challenge-of-humanitarian-diplomacy> (Rabu, 25 Agustus 2021)

bagaimana kepentingan nasional dapat memberikan dampak pada prinsip prinsip moralitas universal.²²

Peningkatan citra baik suatu negara dapat terwujud ketika dalam isu bencana sebuah negara menjadi negara pemberi bantuan, serta adanya pengakuan dunia terhadap negara yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana dan memberikan pengaruh bagi negara lain.²³ Kajian mengenai kegiatan terkait dengan bencana dilakukan dan mendorong peluang kerjasama internasional antara negara yang terlibat, pekerjaan diplomasi dalam situasi bencana telah difokuskan pada tiga bidang utama yang meliputi kegiatan pra-bencana seperti: mitigasi dan pencegahan, kegiatan pasca bencana sebagai respon kemanusiaan, dan rekonstruksi infrastruktur. Dengan demikian, isu bencana berkesempatan menjadi *image building* atau *nation branding* yang dibutuhkan dalam pencapaian diplomasi dan politik luar negeri.²⁴ Pola yang terlihat dari studi kasus diplomasi yang terkait dengan kegiatan pemulihan dari bencana yang terjadi sejauh ini adalah bahwa:

- (a) Kegiatan terkait bencana dapat memiliki dampak jangka pendek pada diplomasi.
- (b) Dalam jangka panjang, faktor non bencana (seperti kepemimpinan dan situasi politik nasional) memiliki pengaruh yang lebih besar dan berdampak

²² Muhadi Sugiono dan Mohamad Rosyidin, "Menegosiasikan yang Tak Bisa Dinegosiasikan: Menjembatani Kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam Konsep Diplomasi Kemanusiaan", hlm. 3

²³ Elsa Clavé, "Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia", Science direct: GeoForum Vol. 39 no. 1, Januari 2008.

²⁴ Anita Afriani Sinulingga, "Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional". Andalas Journal of International Studies Vol. 5, No. 1, Mei 2016, hlm. 21

signifikan pada diplomasi daripada terkait kegiatan rekonstruksi pasca bencana.

Pendekatan diplomasi dalam situasi bencana pada dasarnya merupakan kegiatan terkait bencana hingga berakhir sebagai aktivitas diplomatik. Untuk mendefinisikan dan mengeksplorasi diplomasi terkait pemulihan situasi selama bencana, pertanyaan yang seringkali terucap ialah: “apakah bencana alam mendorong kerjasama internasional di antara negara-negara?.” Namun, patut dicatat bahwa diplomasi kemanusiaan selalu bertujuan untuk memobilisasi dukungan sumber daya publik dan pemerintah untuk operasi dan program kemanusiaan, serta untuk memfasilitasi kemitraan yang efektif untuk menanggapi kebutuhan korban terdampak bencana. Perkembangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemberian bantuan kemanusiaan masih didominasi oleh organisasi internasional dan negara barat sebagai donor terbesar.

Tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan dalam ranah diplomasi kemanusiaan dapat diidentifikasi baik dalam kerjasama lembaga-lembaga kemanusiaan dengan pemerintah nasional dan organisasi internasional, maupun dalam pekerjaan kemanusiaan. Oleh karena itu, baik secara nasional maupun internasional, serta pada tingkat sub-nasional dan lokal, terdapat beberapa tingkat kontak dan intermediasi dalam diplomasi kemanusiaan.²⁵

Di tingkat internasional, arsitektur tata kelola global untuk menangani krisis kemanusiaan dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Office for the*

²⁵ Marion Harroff-Tavel . “The Humanitarian Diplomacy Of The International Committee Of The Red Cross.” ICRC Journal, Spring (January-March) 2005, hal. 72-89

Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA). Sejumlah organisasi kemanusiaan yang bernaung dan lembaga bantuan pembangunan nasional, yang umumnya terdiri dari divisi bantuan bencana memiliki peran yang besar dalam sejumlah praktik diplomasi kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan besar juga memiliki kantor perwakilan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan organisasi regional lainnya. Beberapa memiliki status konsultatif permanen dengan PBB dan mengambil bagian dalam berbagai klaster kompetensi sektor yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan. Pada tingkat interaksi nasional dan internasional ini, lembaga-lembaga terkait terlibat dalam diplomasi kemanusiaan dan mengikutsertakan beberapa staf mereka secara *ad hoc* atau jangka panjang untuk menjadi perwakilan mereka dan melakukan negosiasi krisis.²⁶

1.4.1.2 *Soft Power* pada *Humanitarian Assistance*

1.4.1.2.1. Prinsip *Humanitarian Assistance*

Bantuan luar negeri merupakan suatu fenomena dinamis yang tidak terlepas dari dinamika politik internasional. Hal yang mempengaruhi isu tentang bantuan luar negeri adalah adanya tujuan pembangunan (*development goals*). *Development goals* menjadi acuan bagi negara negara donor dalam membentuk formula atau program program yang akan disalurkan kepada negara penerima.²⁷ Negara yang sering berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan luar negeri adalah Amerika Serikat.²⁸ Bantuan luar negeri yang

²⁶ Ibid

²⁷ John Degenbol Martinussen dan Endberg Pedersen. *Understanding International Development Cooperation*. (London: Zed Books Ltd. 2003). hal 25.

²⁸ Max Bearak dan Lazaro Gamio. *The U.S foreign aid budget, visualized*. [online] Diakses dalam <https://www.washingtonpost.com/graphics/world/which-countries-get-the-most-foreign-aid/> (Jumat, 23 Oktober 2020)

disalurkan oleh Amerika Serikat berupa bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan dan bahkan bantuan dalam sektor militer.²⁹

Secara filosofis, bantuan kemanusiaan itu dapat ditelusuri dari pemikiran Hugo Grotius yang mencetuskan bahwa manusia pada dasarnya tunduk pada hukum alam dan tidak menyukai kekerasan.³⁰ Hukum alam pada dasarnya dihubungkan kepada hukum tuhan atau hukum agama (*...to link reason with some notion of a deity*).³¹ Hukum alam dimaknai sebagai hukum tertinggi yang bersifat universal dan berisi kehendak tuhan (*divine will*).³² Salah satu proponent utamanya adalah Thomas Aquinas yang mempopulerkan mazhab Thomism.³³ Menurut kaum Thomism, hukum alam merupakan hukum yang bersumber dari sesuatu yang berada di luar nalar (irasional) sedangkan menurut Grotius hukum alam merupakan hukum yang berbasis pada akal budi manusia.³⁴

Tiga langkah khusus menurut Grotius dalam rancangan teori intervensi kemanusiaan, mengacu pada sejumlah hal, antara lain:³⁵ Pertama, negara-negara yang mengintervensi harus menghormati hak para penduduk asli untuk menentukan nasibnya sendiri dengan melakukan upaya itikad baik untuk berkonsultasi serta menghormati preferensi aktual yang bersifat domestik; kedua, negara-negara yang terlibat dalam intervensi kemanusiaan harus menggunakan kekuatan dengan cara yang menghormati

²⁹ Harry Bayard Price. *The Marshall Palm & Its Meaning*. (New York: Cornell University Press Ithaca. 1955).

³⁰ Criddle, Evan J., "Three Grotian Theories of Humanitarian Intervention" (2015). Faculty Publications. 1785.

³¹ Ian McLeod, *Legal Theory*, UK: Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 55

³² Brian Bix, "Natural law Theory". *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. Dennis Patterson (ed), Oxford: Blackwell Publisher, 1999, hlm. 24-25

³³ McLeod, *Op.cit.*, hlm. 52

³⁴ *Ibid*

³⁵ Criddle, *Op.cit.*, hlm. 21-22

persyaratan hukum hak asasi manusia internasional, termasuk persyaratan proporsionalitas tinggi yang terkait dengan “hak untuk hidup” manusia;³⁶ ketiga, Dewan Keamanan harus menjadi badan pengawas yang lebih efektif untuk intervensi kemanusiaan, tidak hanya berkenaan dengan struktur pengambilan keputusan, tetapi juga berkaitan dengan upaya Dewan Keamanan merancang resolusi otorisasi *ex ante* dan mengawasi intervensi *ex Post*. Ketiga hal ini bekerja tidak untuk saling melengkapi atau sistem kolektif. Meskipun demikian, ketiganya menggambarkan bagaimana teori dapat meningkatkan koherensi normatif dan legitimasi intervensi kemanusiaan dalam praktiknya.

Kontribusi Grotius pada teori hukum intervensi kemanusiaan paling utama ialah perancangan teori serta sistem intervensi kemanusiaan sebagai hubungan pemberian bantuan paling baik menjelaskan campur tangan militer asing sebagai upaya memfasilitasi perlindungan hak asasi manusia tanpa memaksakan ke arah dominasi internasional dalam suatu problema.³⁷ Ketika suatu negara atau organisasi internasional campur tangan untuk melindungi penduduk suatu negara maka harus bertindak sebagai pemberi bantuan, dan menggunakan hak hukum pribumi untuk membela diri atas nama mereka sendiri. Bingkai intervensi kemanusiaan dalam kerangka hukum relasional menyatakan teori intervensi kemanusiaan Grotius memastikan bahwa hukum internasional mengatur tidak hanya kapan negara dapat menggunakan kekuatan di luar

³⁶ ICCPR, *supra* note 12, pasal 6.1

³⁷ Criddle, *Op.cit.*, hlm. 30

negeri untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga bagaimana mereka harus melakukannya.

Secara khusus, *humanitarian assistance* memikul kewajiban *welas asih* dan kepedulian yang mengharuskan penggunaan kekuasaan sebagai fasilitas untuk kepentingan rakyat yang tertindas, termasuk kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Teori Grotius memegang peranan penting untuk mendamaikan intervensi asing dengan prinsip penentuan nasib sendiri dengan mengharuskan negara-negara yang melakukan intervensi untuk berkonsultasi pada pihak otoritas lokal sebelum bertindak. Konsepsi relasional intervensi kemanusiaan memperjelas karakter otoritas pihak yang mengintervensi untuk melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip kemanusiaan universal.³⁸

Bantuan kemanusiaan merupakan suatu respon atau tanggapan yang ditujukan kepada manusia berupa bantuan logistik atau material demi menyelamatkan jiwa manusia dan meringankan penderitaan.³⁹ Menurut Heyse dalam bukunya yang berjudul “*Choosing the lesser evil: Understanding Decision Making in Humanitarian Aid NGOs*” bantuan kemanusiaan merupakan suatu keharusan untuk mendukung populasi manusia yang mengalami keadaan terdesak dan bertujuan untuk mempertahankan tingkat kualitas hidup mereka.⁴⁰ Bantuan kemanusiaan diberikan melalui berbagai macam bentuk seperti adanya pencegahan konflik dan dukungan untuk mencapai pembangunan damai. Bantuan

³⁸ David L. Ponet & Ethan J. Leib, “Fiduciary Law’s Lessons for Deliberative Democracy”, B.U. L. REV. 2011. hlm. 20

³⁹ CFMP MFC. Humanitarian Assistance Definition.

⁴⁰ Liesbet Heyse, “Choosing the lesser evil: Understanding decision making in humanitarian Aid NGOs” (Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2006), 1-4.

kemanusiaan dibutuhkan untuk dapat mengetahui total korban bencana dan untuk meyakinkan jumlah pasokan yang diberikan cukup dapat mencakup sejumlah sektor seperti kesehatan, jangkauan air bersih, pengungsi, tempat tinggal, keamanan pangan dan psikologis.⁴¹

Bantuan kemanusiaan dialokasikan kepada kawasan yang sedang dilanda bencana dan sangat membutuhkan dari aktor kedua selain pemerintah negara. Dijelaskan dalam “*Guiding Humanitarian Principles in Disaster Work and the Role of UN OCHA, report for International Training Program on Total Disaster Risk Management*” menurut Jamie McGoldrick meningkatnya jumlah bencana alam telah mengakibatkan meningkatnya juga kebutuhan bala bantuan kemanusiaan dan operasi kemanusiaan internasional secara substansial dalam skala dan jangkauan.⁴²

Seiring meningkatnya kebutuhan kemanusiaan dalam perpaduan dengan kelompok atau aktor lain sehingga menghasilkan suatu sistem kemanusiaan internasional yang lebih praktis dan efisien. Bantuan kemanusiaan disusun dalam program yang relatif singkat agar dapat memenuhi kebutuhan yang bertujuan untuk dapat menghubungkan bantuan kemanusiaan dengan pengembangan jangka panjang.⁴³ Bermula dari bencana alam hingga terjadinya gencatan senjata, negara penyokong memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terdampak dengan cara melakukan kerjasama dengan

⁴¹ Ibid

⁴² McGoldrick, J., (2003), *Guiding Humanitarian Principles in Disaster Work and the Role of UNOCHA*, report for International Training Program on Total Disaster Risk Management. [online] Diakses dalam www.adrc.asia/publications/TDRM2003June/06.pdf (Rabu, 4 November 2020)

⁴³ Global Humanitarian Assistance (GHA). 2010. *GHA Report 2010* [online] Diakses dalam <http://www.globalhumanitarianassistance.org> (Rabu, 4 November 2020)

komunitas lain untuk memberikan bantuan sehingga masyarakat yang terdampak agar cepat kembali membaik.⁴⁴

1.4.1.2.2. *Soft Power* dalam Pemberian Bantuan Internasional

Bantuan telah lama menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan pemerintah penerima, meningkatkan dukungan untuk posisi kebijakan tertentu, dan secara lebih umum untuk mendapatkan kerja sama dari negara-negara tujuan mereka mengirim bantuan asing.⁴⁵ Negara donor memiliki motivasi dalam mempertahankan citra publik yang positif di luar negeri diyakini penting untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan luar negeri, dan perubahan persepsi domestik negara lain telah terbukti memprediksi perubahan kebijakan luar negeri terhadap negara-negara tersebut. baik.

Soft power dipahami sebagai kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain melalui rasa ketertarikan yang luas daripada insentif atau sanksi khusus.⁴⁶ Bantuan dapat berfungsi sebagai sumber *soft power* atau kekuatan keras (atau keduanya). Bantuan beroperasi sebagai instrumen kekuatan keras ketika itu mendorong pemerintah penerima untuk mengadopsi posisi kebijakan yang mungkin tidak mereka terima. Kebijakan pemberian bantuan ini beroperasi sebagai instrumen *soft power* ketika meningkatkan afinitas untuk negara donor dan nilai-nilai yang dianutnya pada wilayah transnasional.

⁴⁴ Global Communities Partners for Good. Humanitarian Assistance [online] Diakses dalam <https://www.globalcommunities.org/humanitarianassistance> (Sabtu, 7 November 2020)

⁴⁵ Dietrich, Simone, Minhaj Mahmud and Matthew S. Winters. (2017). "Foreign Aid, Foreign Policy, and Domestic Government Legitimacy: Experimental Evidence from Bangladesh." *The Journal of Politics* 80(1):133–148. Hal. 134.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 136

Soft power yang terkait dengan kemampuan suatu bangsa untuk membujuk dan menarik bangsa lain dengan daya tarik budaya, ide politik, dan kebijakan luar negeri.

Efektifitas bantuan internasional sebagai sumber *soft power* menjadi sangat relevan ketika banyak negara donor dengan agenda kebijakan luar negeri berusaha menggunakan bantuan untuk memenangkan simpati di negara tujuan.⁴⁷ Perubahan relasi antara *soft power* dengan bantuan internasional telah mengubah cara pelaksanaan politik luar negeri dengan cara yang berbeda. Diplomasi dapat dianggap sebagai cara yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. *Soft power* dalam bantuan internasional dapat mengubah struktur kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan dalam tata cara diplomasi. Dalam kasus konflik, kekacauan, perang, bencana alam, diplomasi perlu dilakukan. Seiring berjalannya waktu, diplomasi telah mulai menjadi bidang yang diprivatisasi yang dapat dilihat dari berbagai jenis diplomasi dan salah satunya adalah diplomasi publik yang berarti mempengaruhi perilaku warga negara lain secara paralel dari luar negeri. *Soft power* dalam bantuan kemanusiaan terkait dengan kebijakan luar negeri dengan menekankan kelebihan dan kekuatan negara donor.

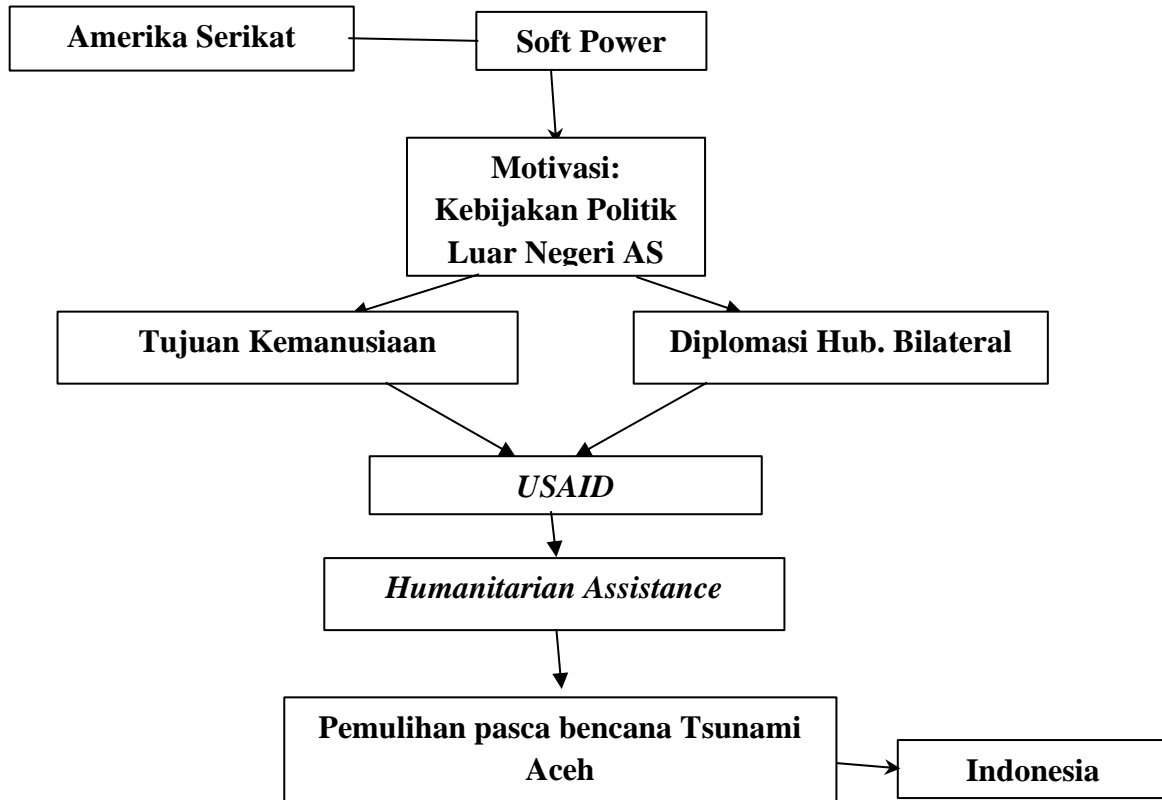
Berdasarkan pemahaman di atas, upaya mendefinisikan *soft power* yang beroperasi sebagai instrumen bantuan ketika meningkatkan empati serta dukungan dari negara donor dan nilai yang kelak mempengaruhi citra politik. Sehingga, ketika *soft power* terdeteksi pada bantuan luar negeri, hal ini agak ambigu untuk menilai apakah bantuan merupakan mekanisme untuk mempromosikan *soft power*. Di satu sisi, ketika sebuah negara menunjukkan kedermawanan dalam memberikan donor, maka mekanisme

⁴⁷ Ibid. hal. 143.

tersebut mendefinisikan bantuan sebagai sumber ekonomi Megara donor daripada *soft power*. Sebagai contoh, ketika pemerintahan George W. Bush atas upayanya untuk “menyelaraskan Amerika Serikat sebagai aspirasi jangka panjang terhadap orang miskin di Afrika melalui inisiatif *Millenium Challenge*, secara teknis kegiatan ini menjanjikan untuk meningkatkan bantuan kepada negara-negara yang bersedia melakukan reformasi, serta upayanya untuk meningkatkan sumber daya untuk memerangi AIDS, dan penyakit menular lainnya.⁴⁸ Keberhasilan dalam mengimplementasikan program-program tersebut akan mewakili investasi yang signifikan dalam *soft power* Amerika. Karena pada mekanismenya, Amerika Serikat menerjemahkan nilai-nilainya, baik secara sosial politik maupun ekonomi, ke dalam bantuan, hingga kemudian berharap negara penerima bersedia mengadopsi pandangan kenegaraan melalui kebijakan tersebut.

⁴⁸ Nye Jr., Joseph S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.

1.5 Sintesa Pemikiran



Kerangka pemikiran mengandung berbagai konsep dan teori yang menurut peneliti memiliki pengaruh besar untuk menginterpretasikan informasi yang didapat peneliti. Kebijakan Luar Negeri merupakan alat yang digunakan negara untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara yang dimaksudkan sebagai nilai signifikan yang ingin dicapai oleh pemerintah suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Pembinaan hubungan antar negara ini terkait dengan aktivitas diplomasi. Diplomasi kemanusiaan sebagai alat penting dari *soft power* merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri

negara donor . Sehingga, pemberian bantuan kemanusiaan dari USAID mampu menjamin hubungan yang baik antara AS dan Indonesia.

Diplomasi kemanusiaan sebagai bentuk interaksi AS ke negara lain dalam pemulihan bencana melibatkan USAID (*United State Agency for International Development*) sebagai sebuah organisasi independen yang berkomitmen untuk memberikan bantuan internasional di bidang kemanusiaan dan ekonomi. Bantuan kemanusiaan selalu bertumpu pada dua pengupayaan: kemanusiaan dan motif dalam pembinaan hubungan bilateral. Pengupayaan atas Bantuan kemanusiaan yang dilakukan USAID merupakan *humanitarian assistance* yang mengacu pada bantuan luar negeri adalah adanya tujuan pembangunan (*development goals*). Bantuan kemanusiaan berpeluang terkait dengan motif yang politis, apabila dikaitkan dengan agenda politik di dunia pada umumnya. Bantuan kemanusiaan pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh AS melalui USAID ini mengandung sejumlah motivasi yang bersifat diplomatis, seperti upaya alasan kemanusiaan, serta pembinaan hubungan persahabatan bilateral, serta pembentukan citra yang tepat yang akan membentuk pandangan positif bagi pemerintahan AS. Maka, pemberian bantuan kemanusiaan di Aceh melalui USAID merupakan bagian dari kebijakan luar negeri AS yang melibatkan *soft power* dengan sejumlah motivasi politis.

1.6 Argumen Utama

Penulis memberikan jawaban dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran bahwa AS selalu teridentifikasi sebagai negara adidaya dengan proyeksi *soft power* sebagai salah satu aspek dari kebijakan luar negeri AS dalam membangun diplomasi transnasional.

Diplomasi kemanusiaan dengan pemberian bantuan internasional dapat menjadi langkah kebijakan luar negeri yang tepat. Pemberian bantuan kemanusiaan melalui USAID dapat menjadi ujung tombak untuk pendekatan politis yang tepat.

Upaya pemerintah AS melakukan bantuan melalui USAID (*United State Agency for International Develpoment*) dalam membantu pemulihan Indonesia dalam menangani tragedi pasca Tsunami Aceh pada tahun 2004 ialah dengan *humanitarian assistance* dengan mengalokasikan bantuan kemanusiaan berupa program *Emergency Response and Reconstruction in Aceh Province*. USAID sebagai perwakilan Amerika Serikat berpeluang sebagai media perbaikan citra negara tersebut di mata internasional. *Humanitarian assistance* dapat menjadi upaya yang tepat untuk Amerika Serikat menonjolkan *soft power*.

Bantuan kemanusiaan pemulihan pasca bencana yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui USAID ini mengandung sejumlah motivasi yang bersifat diplomatis, seperti upaya alasan kemanusiaan, serta pembinaan hubungan persahabatan bilateral antara AS dan Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan pada upaya AS melalui program USAID yang bertujuan membantu pemulihan kehidupan masyarakat pasca Tsunami yang melanda Aceh, sebagaimana cita-cita USAID terbentuk untuk dapat memberikan dampak positif bagi para korban bencana, sehingga berdasarkan serangkaian upaya tersebut penulis akan menilai motif di balik pemberian bantuan tersebut. Program bantuan kemanusiaan sebagai bentuk diplomasi mengandung motivasi menyangkut pembangunan hubungan dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh USAID dalam dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, khususnya kepada korban yang

terdampak bencana tsunami, yang kemudian mempengaruhi pembentukan citra baik kebijakan politik luar negeri AS.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan skripsi ini bersifat eksplanatif. Peneliti melakukan eksplanasi riset dengan menghasilkan lebih rinci mengenai hubungan, dan pengaruh antar kategori dalam suatu fenomena. Pada bagian eksplanasi, peneliti memasuki rekonstruksi teori dan menghasilkan penjelasan berupa proposisi yang sudah ditelaah. Jadi eksplanasi membahas lebih dalam lagi mengenai hasil deskripsi dengan mengaitkan dengan teori yang relevan sebagai diskusi mendalam.⁴⁹

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggabungkan data deskriptif berupa verbal atau tulisan dan perilaku yang sedang diamati.⁵⁰ Penelitian kualitatif berupaya untuk mendapatkan berbagai macam variasi dalam individu, kelompok atau organisasi secara menyeluruh dan dapat di pertanggung jawabkan.⁵¹

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2004-2009, pengambilan tahun tersebut dikarenakan pasca terjadinya bencana gempa tsunami yang terjadi di Aceh. USAID (*United State Agency for International Develpoment*) kemudian turun tangan

⁴⁹ Robert C. Bogdan dan Taylors K.B., "*Qualitative Reasearch for Education: An Introduction to Theory and Methods*" (Boston: Ally and Bacon Inc, 1992) 21-22.

⁵⁰Ibid.

⁵¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "*An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*" (London: Sage Publication, 2014) 6-7

untuk membantu negara Indonesia dalam programnya yakni *Emergency Response and Reconstruction in Aceh Province*. Jangka waktu dalam program USAID adalah lima tahun karena dalam penelitian ini hanya fokus dalam bantuan pokok pasca bencana berupa *framework Emergency Response* dan *Reconstruction* yang berwujud penyediaan fasilitas hidup, kesehatan, pemulihan psikologis, dan perekonomian korban terdampak bencana

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai macam informasi, data dan fakta realita sebagai bukti kuat dalam penelitian.⁵² Dalam melakukan pengumpulan data, dibagi menjadi 2, yakni primer dan sekunder. Data primer merupakan kumpulan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui cara seperti wawancara, kuesioner dan data resmi dari suatu instansi.⁵³ Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil jurnal, buku dan artikel.⁵⁴

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian dan disertai dengan bukti bukti sebagai bentuk pendukung yang relevan.⁵⁵ Analisis data merupakan tahap mengintegrasikan seluruh data yang

⁵² Kriyantono. 2012. *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Kencana: Jakarta. Hlm. 137.

⁵³ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

dikumpulkan sehingga dapat ditariknya suatu hipotesa.⁵⁶ Metode ini membantu memudahkan penulis untuk memahami data dalam melakukan suatu penelitian.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 bab yang disusun terstruktur dengan sistematika sebagai pembagiannya, sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II. Tinjauan Umum. Bab ini berisi tentang berbagai tinjauan yang melandasi analisis dalam penelitian ini. **2.1. USAID (*United State Agency for International Develpoment*)** membahas mengenai organisasi internasional asal Amerika Serikat yang bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi di sejumlah negara yang terdampak bencana alam. Sub bab **2.2. *Humanitarian Assistance*** yang berfokus pada pembahasan mengenai *Humanitarian Assistance*.

BAB III. Analisis. Pada bab ini akan diuraikan mengenai Strategi USAID (*United State Agency for International Develpoment*) dalam penanggulangan bencana Tsunami Aceh di Indonesia sesuai dengan kajian *Humanitarian Assistance*. Upaya Amerika Serikat melalui USAID sebagai organisasi interasnional yang melakukan asistensi dengan berfokus pada perencanaan program *Emergency Response and Reconstruction in Aceh Province*.

⁵⁶ Ibid

BAB IV. Penutup, bab terakhir pada penelitian ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan hasil dari analisis peneliti terhadap studi kasus yang diteliti guna menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan.